

PERENCANAAN BERBASISI DATA (PBD) DALAM PENYUSUNAN RKAS BOS

Erda Farid Hidayani¹, Harsono², Suyatmini³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Surakarta

q100240004@student.ums.ac.id

Abstract: *One of the determinants of a school's success in ensuring the quality of its education is support from BOS budgeting that is right on target. The process of preparing a School Activity Plan and Budget (RKAS) for some school policy makers is not an easy thing. The lack of ability of school principals to plan data-based budgets is one of the obstacles. This encourages the importance of awareness of budget allocation in accordance with data-based planning recommendations. The Education Unit Report Card is a comprehensive main material for preparing data-based BOS RKAS planning, especially based on the results of self-evaluation to be used as a reference for data-based planning that can improve the quality of the education unit. The method used is a descriptive analytical method by reviewing data-based planning literature and the importance of data in preparing budgets so that policies can be taken for effective budget allocation.*

Keywords: *Data-Based Preparation, Education Report Cards, School Budget Work Plans (RKAS).*

Abstrak: Salah satu penentu keberhasilan sekolah dalam menjamin kualitas pendidikannya adalah dukungan dari penganggaran BOS yang tepat sasaran. Proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) bagi sebagian pemangku kebijakan sekolah bukanlah suatu hal yang mudah. Masih minimnya kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan anggaran berbasis data menjadi salah satu kendala. Hal ini mendorong pentingnya penyadaran pengalokasian anggaran sesuai dengan rekomendasi perencanaan berbasis data. Rapor Satuan Pendidikan merupakan bahan utama yang komprehensif untuk penyusunan perencanaan RKAS BOS berbasis data terutama berdasarkan hasil evaluasi diri untuk dijadikan acuan perencanaan berbasis data yang dapat meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Metode yang digunakan yakni metode deskriptif analitis dengan mengkaji literatur perencanaan berbasis data dan pentingnya data dalam menyusun anggaran sehingga dapat mengambil kebijakan dalam pengalokasian anggaran yang efektif.

Kata Kunci: Penyusunan Berbasis Data, Rapor Pendidikan, Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini manusia terlibat dalam kompetisi masal dalam seluruh aspek kehidupan, konsekuensinya lembaga pendidikan di Indonesia harus dapat penciptakan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas

pemerintah telah mengamanatkan sebuah undang-undang tentang sistem pendidikan No. 20 Tahun 2003. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terjaminnya kualitas sumber daya manusia yang kompeten dipengaruhi oleh bagaimana kualitas pendidikannya. Kualitas pendidikan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya melainkan serangkaian proses yang dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam konteks pendidikan seperti kepemimpinan, iklim organisasi, kualitas guru, anggaran, dan fasilitas belajar. Permendiknas No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Supadi (21: 94) mengatakan sumber kualitas pendidikan sangat berkaitan erat dengan ketersediaan dana untuk penyelenggaraan proses pendidikan karena menjadi faktor yang sangat penting untuk dapat memenuhi sarana belajar, manajerial sekolah dan ketersediaan sumber daya sekolah.

Perencanaan dan penganggaran yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks ini, Perencanaan Berbasis Data (PBD) menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis bukti untuk menyusun RKAS BOS. Dengan memanfaatkan data yang akurat dan relevan, sekolah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien. Untuk memastikan perencanaan yang dilakukan akurat dan jelas arahnya, maka dibutuhkan data terkini dan akurat. Data dalam Perencanaan Berbasis Data adalah sekumpulan informasi yang didapat dari platform Rapor Pendidikan. Data tersebut dikembangkan berdasarkan hasil Asesmen Nasional dan dikolaborasikan dengan sumber data lain seperti Data Pokok pendidikan (DAPODIK) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud-ristek) dan Education Management Information System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama. Data terkini dan akurat yang terdapat pada platform Rapor Pendidikan kemudian dirangkum pada Profil Pendidikan satuan pendidikan, dimana data indikator capaian tersebut dapat diakses dan diolah dalam bentuk dashboard yang akan memudahkan pengguna dalam proses analisis dan

pengambilan keputusan serta langkah penyelesaian dari masalah yang akan diambil. Melalui data yang akurat dan terkini, seluruh satuan pendidikan dapat melaksanakan perencanaan yang terukur dan tepat sasaran untuk meningkatkan mutu pendidikannya.

Perencanaan yang dilakukan tanpa data hanya akan menghasilkan kebijakan dan program yang tidak menyelesaikan akar masalah, sehingga masalah yang sama pasti akan berulang. Oleh karena itu, perencanaan berbasis data yang dilakukan secara akurat akan menghasilkan suatu kebijakan yang dapat diturunkan menjadi program dan kegiatan yang mengarah tepat ke penyelesaian akar masalah. Sehingga masalah yang sama dapat diselesaikan dengan baik. PBD juga memungkinkan sekolah untuk lebih responsif terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi, rencana dan anggaran dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi terkini. Oleh karena itu perencanaan anggaran pendidikan harus menggunakan sebaik mungkin sumber daya yang tersedia, dan mensupport setiap argumen dengan analisa kuantitatif dengan menggunakan bantuan cost analysis ini.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengkaji literatur terkait PBD dan implementasi-sinya dalam penyusunan RKAS BOS. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan pendidikan, panduan penyusunan RKAS, dan studi kasus implementasi PBD di satuan pendidikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Landasan Hukum Pengalokasian Dana BOS

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan siklus tahunan dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut pengelolaan keuangan negara diatur pada pasal 3 yaitu, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan di bidang perencanaan dan penganggaran, pada tanggal 24 Juni 2020 ditetapkan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran ini memberikan implikasi yang cukup besar pada penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), serta penyesuaian dokumen perencanaan yang terkait. Meski demikian, RSPP ini diyakini akan menjawab isu krusial dalam hal rumusan kegiatan dan keluaran, serta yang berkaitan dengan pengukuran kinerja penganggaran

Bidang pendidikan merupakan sektor utama yang banyak menyerap anggaran pemerintah daerah, pasal 81 PP No.48/2008 tentang pendanaan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, Negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakat semakin baik.

Menurut Governmental Accounting standar Boards (GASB) yang dikutip oleh Nordiawan, dkk (2007) definisi dana adalah : *“A fund a fiscaland accounting entry with a self, balance set off accounts recording cash and other financial resources, together with all related liabilities and residual equitas or balance , and changes therein, which are segregated for the purpose of carrying on specific activitiesor altaining certain objectives altaining certain objectivies in accordances with special regulations restrictions or limitations”*

b. Permasalahan Perecanaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatataan, penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sebagai memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana sebagai salah satu pertanggung jawaban dalam penggunaan dana bantuan operasioanal sekolah, masing-masing pengelola program ditiap tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/ kota, sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Disanyilir anggaran pendidikan dan penggunaan anggaran dana BOS disamping tidak memadai juga pengalokasiannya belum efisien dan efektif. Demikian juga belum ada kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah

provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Sehingga terjadi tumpang tindih dalam pendanaan sebagian komponen yang lain. Akibatnya pendidikan mengalami kekurangan dana yang merupakan salah satu akibat rendahnya mutu pendidikan. Program BOS oleh pemerintah ditunjukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan, diakui atau tidak adalah merupakan sarana penting untuk menunjang kualitas. Memang sangat riskan, menginginkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik namun tidak ditunjang oleh sarana infrastruktur yang baik pula. Penyaluran BOS yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing daerah diupayakan agar lebih mengena. Sebelum disalurkan, setiap sekolah perlu menyerahkan kebutuhan sarana dan prasarannya yang masih kurang dan benar-benar perlu dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hal itu dimaksudkan agar nantinya dana BOS tidak digunakan untuk kebutuhan yang sebenarnya kurang perlu. Sebab selama ini, kita sering menghamburkan uang Negara untuk kebutuhan yang sebenarnya kurang penting. Jika kebutuhan sebuah sekolah akan sarana fisik seperti gedung telah terpenuhi, BOS bisa dialihkan untuk menambah buku-buku bacaan di perpustakaan untuk peningkatan budaya membaca dan pengetahuan siswa. Selama ini, pembangunan sering diartikan sebagai sebuah usaha pembuatan sarana fisik semata. Karena itu, yang terjadi adalah pembangunan fisik berjalan baik, namun pembangunan mental dan cara berpikir masyarakat cenderung berjalan ditempat.

c. Pentingnya Perencanaan Berbasis Data untuk Menyusun Pembiayaan

Rapor Pendidikan memiliki tujuan untuk menilai kinerja pendidikan di tingkat sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Dengan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN), Kemendikbud-ristek menjamin bahwa pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia terintegrasi dengan standar pendidikan internasional (Indahri, 2021). Hal ini akan membantu sekolah-sekolah di Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membuat siswa-siswi lebih kompetitif dalam mengadaptasi ke fenomena globalisasi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Perencanaan berbasis data (PBD) menjadi pendekatan yang vital dalam proses perbaikan pendidikan. PBD dilakukan dengan mengacu pada informasi yang terdapat dalam rapor pendidikan, yang memberikan pemahaman yang mendalam mengenai capaian pembelajaran dan identifikasi tantangan yang dihadapi oleh satuan pendidikan. Melalui penggunaan data yang komprehensif dan terpercaya, satuan pendidikan dapat memastikan efektivitas kegiatan

perbaikan yang direncanakan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan berbasis data terdiri dari:

1) Identifikasi

Identifikasi dilakukan dengan menganalisis capaian setiap indikator yang disajikan dalam laporan pendidikan, untuk menemukan area yang memerlukan peningkatan.

2) Refleksi,

Refleksi kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari indikator yang capaiannya masih rendah, sebagai landasan untuk merumuskan solusi dalam langkah tindakan perbaikan

3) Langkah Perbaikan (benahi)

Hasil dari identifikasi, refleksi, dan tindakan perbaikan akan dirumuskan dalam rencana kerja tahunan sekolah, yang akan menjadi panduan dalam menjalankan kegiatan perbaikan dan pengembangan pendidikan.

Dengan demikian, perencanaan berbasis data tidak hanya menjadi suatu rutinitas, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan tercapainya pendidikan berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dalam proses perencanaan berbasis data di satuan pendidikan, sumber data utama yang digunakan adalah rapor pendidikan. Rapor pendidikan merupakan kumpulan data yang telah diverifikasi, memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi (Syamsuddin & Harianto, 2023). Oleh karena itu, rapor pendidikan menjadi sumber data primer yang dipercaya dan digunakan dalam perencanaan berbasis data yang kemudian nantinya akan digunakan untuk menyusun RAKS BOS dalam satu tahun anggaran.

IV. KESIMPULAN

BOS sebagai salah satu sumber anggaran yang dapat menjamin mutu Pendidikan di Indonesia memerlukan proses penganggaran yang tepat sasaran. Proses perencanaan dana BOS pada realisasinya belum berdasarkan data yang akurat. Perencanaan Berbasis Data (PBD) menawarkan pendekatan yang vital dalam proses penyusunan anggaran sehingga dapat mengakibatkan perbaikan pendidikan.

PBD dilakukan dengan langkah identifikasi capaian Rapor Pendidikan, refleksi permasalahan satuan pendidikan dan langkah perbaikan dalam wujud RKT yang kemudian menjadi rujukan menyusun RKAS BOS. Melalui penggunaan data yang komprehensif dan

terpercaya, satuan pendidikan dapat memastikan efektivitas kegiatan perbaikan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Indahri, Y. (2021). Asesmen Nasional sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(2).

<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2364>

Nordiawan, D., Putra, I.S., & Rahmawati, M., (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Supadi. (2021). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jakarta: UNJ Press.

Syamsuddin, M. A., & Harianto, B. T. (2023). ANALISIS RAPOR PENDIDIKAN SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN PROGRAM. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Online: <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.207>